

## BAB V

### KESIMPULAN

Dalam dunia politik internasional, hubungan kerjasama dilakukan oleh berbagai aktor untuk mencapai pemenuhan kepentingan bersama. Aktor yang terlibat dalam hubungan kerjasama ini bukan hanya aktor negara, tetapi juga aktor non-negara, seperti institusi internasional dan organisasi internasional. Salah satu organisasi internasional yang memiliki hubungan kerjasama dengan banyak negara anggota PBB adalah *The Food and Agriculture Organization* (FAO) yang menjalin kerjasama dengan lebih dari 194 negara anggota. Agenda yang dibawa oleh FAO dalam pembentukannya adalah untuk mengentaskan kelaparan di 130 negara di seluruh dunia. Upaya pengentasan kelaparan ini disusun FAO dengan cara berkoordinasi dengan negara-negara tersebut untuk menyusun proyek dan program yang dapat membantu optimalisasi kondisi pangan, agrikultur, perikanan dan kehutanan di negara-negara bersangkutan. Semenjak dibentuk pada tahun 1945, sudah banyak proyek FAO yang membuahkan hasil baik dan terbukti membantu banyak negara dalam melewati permasalahan krisis yang mereka hadapi.

Indonesia merupakan salah satu anggota dari FAO yang bergabung pada tahun-tahun awal FAO dibentuk. Setelah merdeka pada tahun 1945, Indonesia memutuskan untuk bergabung bersama FAO di tahun 1948. Setelah bekerja sama selama 30 tahun, pada tahun 1978 FAO mendirikan kantor representasinya di Jakarta agar memudahkan koordinasi dan kolaborasi dalam permasalahan pengentasan kelaparan di Indonesia. Sampai tahun 2020 sudah lebih dari 650 proyek dan program yang dilaksanakan oleh FAO di seluruh Indonesia dengan bantuan dari berbagai ahli dan konsultan. Dalam mengerjakan program dan proyek tersebut, FAO memiliki *Country Programming Framework* (CPF) yang berguna sebagai kerangka program dan proyek yang akan dilaksanakan di Indonesia. FAO memprioritaskan empat bidang prioritas yang berlaku untuk memandu kemitraan dan dukungan FAO kepada pemerintah Indonesia. Keempat bidang prioritas dari CPF dikaji dalam periode waktu 5 tahun sekali untuk menyesuaikan dengan kebutuhan negara dalam menangani permasalahan pangannya.

Indonesia terdiri atas wilayah kepulauan yang memiliki kondisi geografis yang berbeda di tiap pulau, sehingga tantangan ketahanan pangan yang dihadapi di setiap provinsi nya juga

berbeda. Beberapa kajian akademis di bidang pertanian menyebutkan bahwa memang pada faktanya kondisi pangan di wilayah Indonesia timur memiliki kondisi yang lebih buruk daripada wilayah barat dan tengah Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perbedaan budaya bercocok tanam, sifat geografis yang berbeda, makanan pokok yang berbeda di masing-masing wilayah, kondisi akses transportasi dan ekonomi yang masih dalam pengembangan sehingga menyulitkan masyarakat untuk memiliki akses terhadap pangan yang sehat. Selain itu juga pengetahuan dasar pangan yang belum baik membuat SDM di wilayah Indonesia timur kurang memahami pemanfaatan pangan daerah mereka sendiri. Wilayah Indonesia timur yang masuk 5 daerah dengan ketahanan pangan terendah pada tahun 2016-2020 adalah Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Papua sebagai wilayah dengan kondisi terburuk. Wilayah Indonesia timur menjadi wilayah yang mengalami kerentanan pangan tinggi juga karena masih tergantung pada pasokan dan distribusi pangan yang berasal dari wilayah-wilayah di Indonesia bagian barat, seperti pulau Jawa dan Kalimantan. Ketahanan pangan di Indonesia timur diperparah dengan tingginya pengungsi yang masuk ke wilayah-wilayah tersebut yang sudah menjadi permasalahan dari tahun 1970 hingga saat ini. Pengungsi tersebut masuk dari berbagai daerah, baik dari negara tetangga Papua Nugini maupun dari dalam Indonesia sendiri. Dengan banyaknya pendatang, warga lokal menjadi kehilangan jatah pangan karena harus berbagi dan sejauh ini pembagian pangan tersebut lebih didominasi oleh pendatang karena memiliki akses yang lebih baik.

Secara khusus, Papua merupakan wilayah dengan kerentanan pangan tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia. Dari total 156 distrik terdapat 119 distrik (setara 76,18 persen) yang masih mengalami defisit ketersediaan pangan. Kondisi tersebut dipengaruhi juga dengan kondisi ekonomi masyarakat Papua. Provinsi Papua masih menjadi wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi dengan persentase 26,55 penduduk miskin. Persentase tersebut diakibatkan karena masyarakat lokal yang tidak memiliki sumber pendapatan yang baik, karena harus bersaing dengan pendatang dari lokal maupun negara tetangga. Selain kondisi ekonomi, kondisi topografi di Papua yang masih bervariasi menjadikan akses transportasi ke masing-masing daerahnya sulit. Transportasi yang masih menjadi moda transportasi utama di Papua adalah transportasi darat dan udara, sedangkan moda transportasi udara memiliki ongkos kirim yang mahal sehingga jarang penduduk lokal memakai moda transportasi udara untuk dapat mengakses pangan. Di sisi lain, dalam permasalahan akses ke air bersih, sanitasi yang higienis dan fasilitas

pengolahan bahan pangan yang sehat, provinsi Papua masih menghadapi tantangan karena kenyataannya, 55,61 persen rumah tangga di Provinsi Papua tidak memiliki akses terhadap air minum dan air bersih, sedangkan dari angka tersebut hanya 30,50 persen yang memiliki akses terhadap sanitasi yang higienis. Kondisi-kondisi diatas yang pada akhirnya menjadikan provinsi Papua sebagai provinsi dengan ketahanan pangan terendah di Indonesia.

Melihat kondisi tersebut, FAO menyusun beberapa program dan proyek dalam periode waktu 2010-2019 dalam upaya membantu masyarakat di provinsi Papua memiliki ketahanan pangan yang baik. Dalam penyusunan program dan proyek tersebut FAO membaginya menjadi tiga kategori besar yaitu 1) Area Peternakan dan Pertanian; 2) Area Kelautan dan Perikanan; dan 3) Area Kehutanan, tetapi hanya area peternakan dan pertanian saja yang memiliki dampak besar terhadap ketahanan pangan di Papua dalam periode 2010-2019. Diawali pada tahun 2011 dimana FAO membentuk sebuah proyek mengenai pengendalian Flu Burung melalui program Emergency Centre for Transboundary Animal Diseases (ECTAD) yang dibentuk pada 2005, ketika wabah tersebut merebak. Dengan keberhasilan proyek tersebut, pada tahun 2017, Papua dinyatakan bebas flu burung dan dapat dibuka sebagai pengembangan usaha perunggasan domestik, yang pada akhirnya membantu perekonomian masyarakat Papua. Program kedua adalah pada tahun 2015 dimana FAO melalui World Food Programme (WFP) masuk ke provinsi Papua dan membantu masyarakat dalam mencapai ketahanan pangan di Papua. WFP sendiri adalah organisasi bentukan FAO yang memiliki fokus khusus yaitu untuk membantu negara-negara yang memiliki kerentanan pangan tinggi agar dapat mencapai ketahanan pangan dengan bantuan WFP yang berkoordinasi dengan pemerintah negara terkait. Dalam usaha tersebut di Papua, WFP bekerja sama dengan berbagai institusi pemerintahan dan kementerian, seperti Kementerian Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan. FAO menyusun *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) atau Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagai jurnal acuan program, di dalam FSVA tersebut berisi kondisi yang telah terjadi ~~lebih dulu~~ di Papua dan strategi dalam mengatasi tantangan di setiap indikatornya. Program ketiga yang menjadi bahan analisis penulis adalah proyek FAO di tahun 2016 yang bernama “Pemanfaatan Pati Sagu di Indonesia”. Proyek ini disusun dari hasil koordinasi FAO, Kementerian Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan dalam upaya pemanfaatan pati sagu di Indonesia timur, termasuk Papua. Dalam menjalankan proyek ini, FAO menyusun empat azas yang terdiri dari 1) Mengembangkan keunggulan komparatif yang dimiliki masing-masing daerah; 2) Menerapkan kebijakan yang

terbuka terkait ketahanan pangan; 3) Mendorong terjadinya perdagangan antar daerah; dan 4) Mendorong terciptanya mekanisme pasar yang berkeadilan. Proyek ini mendorong produktivitas dan pengetahuan masyarakat Papua dalam pemanfaatan pati sagu sebagai sumber pendapatan utama daerah. FAO memberikan pelatihan yang diharapkan dapat membantu masyarakat. Secara kuantitatif dan berdasarkan data statistika, pelaksanaan ketiga program (ECTAD, WFP, dan Pemanfaatan Pati Sagu) di atas membawa perbaikan dalam perekonomian dan lingkungan, tetapi belum ada dampak nyata terhadap ketahanan pangan di Provinsi Papua.

Dari hasil analisis menggunakan teori neoliberalisme yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan antara FAO dengan pemerintah Indonesia merupakan kerjasama dimana hubungan internasional diwarnai oleh hubungan formal antara negara dengan organisasi internasional. Kerjasama ini muncul karena adanya ketergantungan yang muncul akibat dari kekosongan dalam anarki yang awalnya hanya diisi oleh negara sebagai aktor utama. Dengan adanya FAO sebagai aktor non-negara dapat mengurangi dampak negatif dari anarki terhadap aktor politik internasional yaitu ketakutan dan ketidakpastian. Kerjasama yang dilakukan dilandasi dengan adanya kepentingan dan tujuan bersama antar FAO dan pemerintah Indonesia, yaitu menegakan ketahanan pangan di provinsi Papua. Karena adanya kesamaan tujuan tersebut menjadikan hubungan kerjasama dan koordinasi yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan kerangka CPF. Jika dilihat dari konsep *Food Security*, FAO memastikan keempat dimensi ketahanan pangan terpenuhi lewat strategi yang disusunnya dalam proyek WFP dan lewat azas-azas yang mendasari program “Pemanfaatan Pati Sagu” sehingga perubahan statistik menjadi lebih baik menjadi bukti nyata dari keberhasilan program dan proyek tersebut.

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 3 kerjasama utama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan FAO dalam periode waktu 2010-2019 yang berfokus terhadap permasalahan ketahanan pangan di Papua. Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan FAO tersebut dilandaskan oleh kepentingan yang sama yaitu berusaha menegakan ketahanan pangan di provinsi Papua. Dengan kondisi Indonesia yang masih harus berusaha menghadapi tantangan ketahanan pangan di Papua, FAO masuk sebagai organisasi internasional yang memiliki tujuan untuk membantu negara dalam menangani permasalahan pangannya. Kerjasama tersebut juga berjalan dengan adanya koordinasi antara kedua aktor bersangkutan, baik pemerintah Indonesia maupun FAO. karena dengan adanya koordinasi yang kuat antara FAO

dengan Kementerian Pertanian dan BKP dalam menjalankan program dan proyeknya di Papua, FAO dapat mengetahui bagaimana kondisi yang terjadi di Papua sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anthony, Mely Caballero. "Understanding Non-Traditional Security." In *An Introduction to Non-Traditional Security Studies: a Transnational Approach*, 5-6. n.d.
- Archer, Clive. In *International Organizations*, 2. n.d.
- Dunne, Kurki, Smith. "International Relations Theories." 114-115. n.d.
- Feld, Werner J. In *International Organizations: A Comparative Approach*, 10. n.d.
- Merriam, Sharan B. In *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*, 5. n.d.
- Sterling-Folker, Jennifer. "Neoliberalism." In *International Relations Theories: Discipline and Diversity*, 114. Oxford University Press, n.d.
- Santoso, Budi. "Diversifikasi Produk Pangan Berbasis Sagu Untuk Meningkatkan Peran Bahan Pangan Lokal." *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Pertanian UNS*, 2018.
- Wiranthi, Puspi Eko. "DETERMINANTS OF HOUSEHOLD FOOD SECURITY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF EASTERN AND NON-EASTERN INDONESIA." n.d.: 2.

### Artikel dan Jurnal

- Gayati, Mentari Dwi dan AA Ariwibowo. *Kementan Nyatakan Papua Bebas Flu Burung Jadi Peluang Ekspor*. 2017. <https://www.antaraneews.com/berita/664648/kementan-nyatakan-papua-bebas-flu-burung-jadi-peluang-ekspor>.
- Haryanto, Bambang. "Potensi dan Pemanfaatan Pati Sagu dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat." *Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi*. n.d.
- Kemenlu. "Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2019 Tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah." n.d.
- Khanisa. *Seminar Internal 'Dinamika Isu Dan Kebijakan Isu Pengungsi Di Wilayah Indonesia Timur.'* Seminar Internal "Dinamika Isu dan Kebijakan Isu Pengungsi di Wilayah Indonesia Timur". Politik LIPI, 2020.
- Web, Relief. *FAO Failure of Subsidized Seeds Affects 1463 Agricultural Families Causing Food Insecurity in Hill Regions*. n.d. <https://reliefweb.int/report/nepal/nepal-fao-failure-subsidized-seeds-affects-1463-agricultural-families-causing-food> (accessed Mei 2020).

### Website

- Agapa, Yance. *Hutan dan Tanah Papua dalam Ancaman Investasi*. n.d. <https://suarapapua.com/2020/05/27/nico-wamafma-hutan-dan-tanah-papua-dalam-ancaman-investasi/>.

- Bappenas. Membaiknya Situasi Gizi Indonesia di Tengah Memburuknya Perkembangan Pangan dan Gizi di Asia Pasifik. n.d. <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/membaiknya-situasi-gizi-indonesia-di-tengah-memburuknya-perkembangan-pangan-dan-gizi-di-asia-pasifik/>.
- BBC. Penduduk di 39 Desa di NTT Terancam Kelaparan. April 2016. [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/04/160404\\_indonesia\\_kekeringan\\_ntt](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160404_indonesia_kekeringan_ntt). (accessed Mei 2020).
- BKP. Sejarah Pembentukan. n.d. <http://bkp.pertanian.go.id/sejarah>.
- BPS. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi. 2007-2019. <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1219>.
- Tanaman Pangan Provinsi Papua. n.d. <https://papuabarat.bps.go.id/subject/53/tanaman-pangan.html>.
- CMS, October. Kembangkan Diversifikasi Pangan Berbasis Sagu, Kementan Gandeng FAO. n.d. <http://bkp.pertanian.go.id/blog/post/kembangkan-diversifikasi-pangan-berbasis-sagu-kementan-gandeng-fao>.
- Dewan Ketahanan Pangan, Pemerintah Provinsi Papua. "Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Papua." 2015: xviii.
- Dhara, Pos. WFP Papua Resmi Akhiri Program di Kota Jayapura. 2017. <https://www.dharapospapua.com/2017/06/wpf-papua-resmi-akhiri-program-di-kota.html>.
- ECCHR. FAO/WHO Double Standards of International Agrocompanies. n.d. <https://www.ecchr.eu/en/case/faowho-fail-to-asses-whether-pesticide-sales-in-india-breach-international-standards/>. (accessed Mei 2020).
- FAO. A Short History of FAO. 2020. . <http://www.fao.org/about/en/>. (accessed May 2020).
- "About Codex Alimentarius." CODEXALIMENTARIUS FAO-WHO. n.d. <http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/about-codex/en/>. (accessed May 2020).
- Area Agriculture | FAO in Indonesia. n.d. <http://www.fao.org/indonesia/programmes-and-projects/past-project/area-agriculture/en/>.
- ECTAD Indonesia | FAO in Indonesia . n.d. <http://www.fao.org/indonesia/programmes-and-projects/ectad-indonesia/en/>.
- FAO in Indonesia. n.d. (accessed Februari 2020).
- "Helping Rural Nepalese Grow More Food." FAO. n.d. <http://www.fao.org/news/story/en/item/43594/icode/> (accessed Mei 2020).
- Indonesia at a Glance. n.d. (accessed Februari 2020).
- Programmes and Projects | FAO in Indonesia. n.d. . <http://www.fao.org/indonesia/programmes-and-projects/en/>. (accessed April 2020).

- "Soil and Environmental Degredation and Desertification in Africa." n.d. <http://www.fao.org/3/x5318e/x5318e07.htm>. (accessed Mei 2020).
- FAO. "Strategic Areas." Country Programming Framework (CPF), 2016-2020: 6-10.
- Vision and Mission. n.d. <http://www.fao.org/cgrfa/overview/vision-mission/en/>. (accessed April 2020).
- "World Map in Pesticide Legislation." Plant Production and Protection Division: International Code of Conduct on Pesticide Management. n.d. <http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/code/en/>. (accessed Mei 2020).
- FIAN. About Us FIAN Nepal. 2018. . <https://fiannepal.org/who-we-are/about-us/?lang=en> (accessed Mei 2020).
- Indrawan, Angga. Potensi Pangan Indonesia Timur Perlu Terus Dioptimalkan. 2017. <https://republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/17/04/23/ooV2zj365-potensi-pangan-indonesia-timur-perlu-terus-dioptimalkan>. (accessed 2020).
- Perserikatan Bangsa Bangsa: Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. n.d. [https://kemlu.go.id/portal/id/read/134/halaman\\_list\\_lainnya/perserikatan-bangsa-bangsa-pbb](https://kemlu.go.id/portal/id/read/134/halaman_list_lainnya/perserikatan-bangsa-bangsa-pbb). (accessed Mei 2020).
- Kementan. Kementan Bersama FAO dan USAID Tingkatkan Kerjasama Penanggulangan Zoonosis dan PIB. n.d. <https://ditjenpkh.pertanian.go.id/kementan-bersama-fao-dan-usaid-tingkatkan-kerjasama-penanggulangan-zoonosis-dan-pib>.
- Kementrian, Kesehatan. "Buku Saku Pemantauan Status Gizi." 2017. [http://www.kemas.kemkes.go.id/assets/upload/dir\\_519d41d8cd98f00/files/Buku-Saku-Nasional-PSG-2017\\_975.pdf](http://www.kemas.kemkes.go.id/assets/upload/dir_519d41d8cd98f00/files/Buku-Saku-Nasional-PSG-2017_975.pdf). (accessed Februari 2020).
- Marboen, Ade P. Papua Punya 300 Lapangan Terbang. 2012. <https://www.antaraneWS.com/berita/346760/papua-punya-300-lapangan-terbang>.
- Pelindo. Jayapura. n.d. . <https://inaport4.co.id/branch/read/2/2>. (accessed 2020).
- Person. Ketahanan Pangan Indonesia Terus Membaik. Desember 2016. <https://bisnis.tempo.co/read/829150/ketahanan-pangan-indonesia-terus-membaik/full>. (accessed Mei 2020).
- Putri, Winda Destiana. Pertanian di Indonesia Timur Perlu Ditingkatkan. Republika, 2017.
- Santi, Natalia. FAO Bangun Pemrosesan Sagu Terintegrasi Pertama di Dunia . 2017. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171219150143-106-263523/fao-bangun-pemrosesan-sagu-terintegrasi-pertama-di-dunia>.
- WFP. Governments. n.d. . <https://www.wfp.org/governments>.
- World Food Programme - Overview. n.d. (accessed Februari 2020).





